



# PELAKSANAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN LEBONG UTARA

Defi Lesmana Nengsih<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu.

## ARTICLE INFORMATION

Received: February, 18, 20

Revised: March, 01, 20

Accepted: March 12, 20

Available online: Sept, 20, 20

## KEYWORDS

Implementation, Participation, Planning, Developmen

## CORRESPONDENCE

Phone: -

E-mail: [defi.lm@yahoo.co.id](mailto:defi.lm@yahoo.co.id)

THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE  
UNDER THE [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) LICENSE



## A B S T R A C T

This study aims to investigate the implementation and community participation in development planning in North Lebong district. The method used is descriptive qualitative research with an inductive approach, descriptive research aims to create a picture or writing systematically about community participation. The results showed that the implementation of and participation in community development planning has not been optimal. It can be seen from the aspect of research awareness to participate in the planning process looks at the presence of the public who attended the meetings. People who attended by 23 people from the invitation of 180 people. The percentage of attendance at public meetings is still low, amounting to 13.88%, but public awareness has to be present there, it's just that people have to work to earn a living so do not attend meetings. The participation of the community in regard to / planning information to absorb the low attendance levels to participate in the planning process. This is because the chance of expression is very limited and the combined meetings with the inauguration of BPD and entertainment events in a single organ Northern District Lebong. Public participation in decision-making and prioritization of development yet to be seen. The absence of community participation in overseeing the planning of development programs to be realized because the public does not know about the programs / activities proposed, and they do not know the amount of the budget provided.

## INTRODUCTION

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat di Kecamatan Lebong Utara dalam perencanaan pembangunan. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat yang secara sadar dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan. Partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Peneliti menelaah proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan serta mengikuti tahapan musrenbang mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan dan pembangunan di Kecamatan Lebong Utara.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kecamatan merupakan rumusan elit desa/kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat masih jauh dari harapan.

Fenomena ini dapat dilihat berdasarkan hasil observasi penulis ketika menghadiri kegiatan musbangdes di Desa Gandung Baru pada tanggal 23 Januari 2015. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat desa dan pegawai kecamatan, namun warga desa yang hadir hanya 15 orang sebagai perwakilan masyarakat. Begitu pula di Desa Kampung Dalam, perwakilan yang hadir hanya 10 orang sedangkan jumlah penduduk Desa Kampung Dalam sebanyak 897 jiwa. Tentu jumlah warga yang hadir tidak mewakili aspirasi masyarakat di kedua desa tersebut karena warga yang datang hanya sebagian kecil dari jumlah masyarakat di desa tersebut.

Pada tahun 2014 yang lalu telah dilakukan musrenbang Kabupaten Lebong dan Provinsi Bengkulu dan telah terbit Dokumen Pengguna Anggaran (DPA).

Usulan atau aspirasi masyarakat yang telah ditampung dari musrenbang tingkat desa lalu menjadi skala prioritas di tingkat kecamatan. Pada kenyataannya program atau kegiatan yang diusulkan tidak termasuk di dalam program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. Hal ini menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan Lebong Utara dalam memberikan usulan, saran dan pendapat di Kecamatan Lebong Utara.

Masyarakat beranggapan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan tidak didengar dan tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, sehingga masyarakat enggan mengikuti musrenbang pada tahun 2015.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lebong Utara serta untuk mengetahui skala prioritas dalam pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Lebong Utara.

## MATERIALS AND METHODS

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2011;15), yaitu mendeskripsikan/ menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian diperoleh gambaran yang jelas tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Lebong Utara.

Teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah pendekatan kualitatif yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar memperoleh gambaran yang lebih tajam dari hasil pengamatan untuk ditarik kesimpulan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagian besar merupakan hasil wawancara terstruktur dengan informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Langkah-langkah lebih rinci yang digunakan dalam analisis model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles and Humberman dalam Sugiyono (2011:247). Dalam model ini ada tiga komponen analisis yaitu *Data reduction* (reduksi data), *Data display* (penyajian data), *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan).

## RESULTS AND DISCUSSION

Menurut Cohen dan Uphoff, yang dikutip oleh Harahap (2001 : 37), ada empat aspek untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi acuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Kecamatan Lebong Utara dapat dilihat dari 4 aspek sebagai berikut.

### 1. Kesadaran masyarakat Kecamatan Lebong Utara untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan

Menurut Cohen dan Uphoff, yang dikutip oleh Harahap (2001: 37) bahwa Keikutsertaan masyarakat dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam menerima, menerima dengan syarat, maupun menolaknya dalam perencanaan. Hal ini belum terlihat pada pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lebong Utara.

Hasil wawancara dan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang di Kecamatan Lebong Utara belum memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima atau menolak perencanaan. Diungkapkan oleh Kepala Desa Ladang Palembang, bahwa pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan terlalu banyak acara tambahan yang seharusnya

tidak disatukan dengan acara musrenbang. Menurut beliau, acara musrenbang tingkat kecamatan semestinya menyediakan setengah waktu dari acara yakni apabila acara ini direncanakan selama 4 jam maka setidaknya 2 jam disediakan untuk diskusi dalam merencanakan pembangunan di Lebong Utara.

Kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sangat dibatasi, hanya 3 orang yang bisa menyampaikan aspirasi dan tidak ada pemaparan tentang anggaran yang dibutuhkan, serta program-program pembangunan yang akan ditargetkan untuk dibangun di Kecamatan Lebong merupakan penyebab masyarakat tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Acara musrenbang yang dirangkaikan dengan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Lebong Utara serta penyampaian kata sambutan dari kecamatan dan pihak lainnya menjadi penyebab musrenbang tidak maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat.

### 2. Keikutsertaan masyarakat dalam memperhatikan/menyerap informasi

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lebong Utara, masyarakat terlibat dalam menentukan dan merencanakan usulan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kecamatan merupakan partisipasi hampa, tanpa makna masyarakat dalam berpartisipasi tidak tahu mengenai apa-apa yang mereka bisa usulkan, dan berapa anggaran yang disediakan, sedangkan dalam musrenbang tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan masyarakat mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan ikut dalam pengambilan keputusan.

Kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sangat dibatasi, hanya 3 orang yang bisa menyampaikan

aspirasi dan tidak ada pemaparan tentang anggaran yang dibutuhkan, serta program - program pembangunan yang akan ditargetkan untuk dibangun di Kecamatan Lebong merupakan penyebab masyarakat tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Acara musrenbang yang dirangkaikan dengan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Lebong Utara serta penyampaian kata sambutan dari kecamatan dan pihak lainnya menjadi penyebab musrenbang tidak maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat.

### **3. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan pada pembangunan**

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan, Menurut Diana Conyers (1994:5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri, sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan.

Hal ini disampaikan oleh Cohen dan Uphoff, yang dikutip oleh Harahap (2001 : 37) partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dilihat dari Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan pada pembangunan.

### **4. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan prioritas kegiatan dalam musrenbang**

Menurut Cohen dan Uphoff, yang dikutip oleh Harahap (2001: 37), partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dapat dilihat dari aspek keikutsertaan masyarakat dalam memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam musrenbang.

Hal ini juga sejalan dengan Tjokroamidjojo (1995:206) yang menyatakan bahwa suatu rancangan pembangunan akan tercapai apabila adanya keterlibatan aktif masyarakat banyak yang biasa disebut partisipasi. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk penyusunan, penentuan dan pengambilan kebijakan termasuk dalam menentukan prioritas pembangunan.

Partisipasi masyarakat yang berupa keikutsertaan dalam menentukan prioritas pembangunan di Kecamatan Lebong Utara belum ada. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan Lebong Utara tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat yang datang untuk ikut memutuskan prioritas kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan waktu diskusi sangat singkat, sehingga masyarakat yang datang ke acara tersebut tidak dapat menyampaikan tanggapan dan usulan. Selain itu tidak adanya pemaparan hasil musrenbangdes yang dikumpulkan dari desa/kelurahan se-Kecamatan Lebong Utara. Pemaparan yang dilakukan oleh Kepala BAPPEDA, berupa gambaran umum tujuan dan sasaran dari kegiatan musrenbang.

### **5. Temuan Lapangan dan Hambatan - Hambatan yang ada pada pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat Kecamatan Lebong Utara**

- a) Belum adanya kompensasi seperti uang saku atau pengganti transportasi bagi peserta musrenbang menyebabkan kehadiran peserta sangat sedikit karena pelaksanaan musrenbang menyita waktu untuk



bekerja peserta musrenbang untuk mendapat penghasilan

- b) Berbagai macam rangkaian acara tambahan pada musrenbang tingkat Kecamatan Lebong Utara sehingga waktu untuk diskusi hanya disediakan kurang lebih 15 menit hal ini menyebabkan belum adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Cohen dan Uphoff, yang dikutip oleh Harahap (2001 : 37), ada empat aspek untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi acuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Kecamatan Lebong Utara dapat dilihat dari 4 aspek sebagai berikut.

#### **6. Kesadaran masyarakat Kecamatan Lebong Utara untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan**

Menurut Cohen dan Uphoff, yang dikutip oleh Harahap (2001: 37) bahwa Keikutsertaan masyarakat dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam menerima, menerima dengan syarat, maupun menolaknya dalam perencanaan. Hal ini belum terlihat pada pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Lebong Utara.

Hasil wawancara dan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang di Kecamatan Lebong Utara belum memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima atau menolak perencanaan. Diungkapkan oleh Kepala Desa Ladang Palembang, bahwa pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan terlalu banyak acara tambahan yang seharusnya tidak disatukan dengan acara musrenbang. Menurut beliau, acara musrenbang tingkat kecamatan semestinya menyediakan setengah waktu dari acara yakni apabila acara ini direncanakan selama 4 jam maka setidaknya 2 jam disediakan untuk diskusi

dalam merencanakan pembangunan di Lebong Utara.

Kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sangat dibatasi, hanya 3 orang yang bisa menyampaikan aspirasi dan tidak ada pemaparan tentang anggaran yang dibutuhkan, serta program - program pembangunan yang akan ditargetkan untuk dibangun di Kecamatan Lebong merupakan penyebab masyarakat tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Acara musrenbang yang dirangkaikan dengan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Lebong Utara serta penyampaian kata sambutan dari kecamatan dan pihak lainnya menjadi penyebab musrenbang tidak maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat.

#### **7. Keikutsertaan masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap informasi**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Lebong Utara, masyarakat terlibat dalam menentukan dan merencanakan usulan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kecamatan merupakan partisipasi hampa, tanpa makna masyarakat dalam berpartisipasi tidak tahu mengenai apa-apa yang mereka bisa usulkan, dan berapa anggaran yang disediakan, sedangkan dalam musrenbang tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan masyarakat mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan ikut dalam pengambilan keputusan.

Kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sangat dibatasi, hanya 3 orang yang bisa menyampaikan aspirasi dan tidak ada pemaparan tentang anggaran yang dibutuhkan, serta program - program pembangunan yang akan ditargetkan untuk dibangun di Kecamatan Lebong merupakan penyebab masyarakat tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

Acara musrenbang yang dirangkaikan dengan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Lebong Utara serta penyampaian kata sambutan dari kecamatan dan pihak lainnya menjadi penyebab musrenbang tidak maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat.

#### **8. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan pada pembangunan**

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan, Menurut Diana Conyers (1994:5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri, sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan.

Hal ini disampaikan oleh Cohen dan Uphoff, yang dikutip oleh Harahap (2001 : 37) partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dilihat dari Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan pada pembangunan.

#### **9. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan prioritas kegiatan dalam musrenbang**

Menurut Cohen dan Uphoff, yang dikutip oleh Harahap (2001: 37), partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dapat dilihat dari aspek keikutsertaan masyarakat dalam

memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam musrenbang.

Hal ini juga sejalan dengan Tjokroamidjojo (1995:206) yang menyatakan bahwa suatu rancangan pembangunan akan tercapai apabila adanya keterlibatan aktif masyarakat banyak yang biasa disebut partisipasi. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk penyusunan, penentuan dan pengambilan kebijakan termasuk dalam menentukan prioritas pembangunan.

Partisipasi masyarakat yang berupa keikutsertaan dalam menentukan prioritas pembangunan di Kecamatan Lebong Utara belum ada. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan Lebong Utara tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat yang datang untuk ikut memutuskan prioritas kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan waktu diskusi sangat singkat, sehingga masyarakat yang datang ke acara tersebut tidak dapat menyampaikan tanggapan dan usulan. Selain itu tidak adanya pemaparan hasil musrenbangdes yang dikumpulkan dari desa/kelurahan se-Kecamatan Lebong Utara. Pemaparan yang dilakukan oleh Kepala BAPPEDA, berupa gambaran umum tujuan dan sasaran dari kegiatan musrenbang.

#### **10. Temuan Lapangan dan Hambatan - Hambatan yang ada pada pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat Kecamatan Lebong Utara**

- c) Belum adanya kompensasi seperti uang saku atau pengganti transportasi bagi peserta musrenbang menyebabkan kehadiran peserta sangat sedikit karena pelaksanaan musrenbang menyita waktu untuk bekerja peserta musrenbang untuk mendapat penghasilan
- d) Berbagai macam rangkaian acara tambahan pada musrenbang tingkat Kecamatan Lebong Utara sehingga

waktu untuk diskusi hanya disediakan kurang lebih 15 menit hal ini menyebabkan belum adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

## CONCLUSION

Kesimpulan dapat dilihat dari aspek penelitian sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Lebong Utara yakni Penerapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Lebong Utara belum sesuai dengan rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lebong serta Panitia Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Lebong Utara. Hal ini terlihat dari keterlambatan dimulainya musrenbang, tidak adanya acara diskusi dalam penentuan prioritas dan tidak adanya pemaparan terkait dengan musrenbang yang seharusnya disampaikan oleh Camat Lebong Utara dan perwakilan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b) Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan terlihat pada kehadiran masyarakat yang hadir pada musrenbang. Masyarakat yang hadir sebanyak 23 orang dari undangan yang dibarkankan sebanyak 180 orang. Persentase kehadiran masyarakat pada musrenbang memang masih rendah

yakni sebesar 13,88 % akan tetapi kesadaran masyarakat untuk hadir telah ada. Hal ini terlihat dari pernyataan masyarakat yang tidak hadir dikarenakan masyarakat harus bekerja untuk mencari nafkah, masyarakat juga beranggapan bahwa keterlibatannya dalam musrenbang tidak memiliki pengaruh pada proses perencanaan pembangunan

- c) Keikutsertaan masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap informasi perencanaan masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan. Hal ini dikarenakan kesempatan dalam menyampaikan pendapat sangat terbatas dan hanya 3 orang perwakilan masyarakat yang diperkenankan untuk menyampaikan pendapat mereka. Musrenbang yang dirangkaikan dengan acara pelantikan BPD dan acara hiburan organ tunggal merupakan penyebab lain masyarakat tidak memperhatikan proses perencanaan di Kecamatan Lebong Utara.
- d) Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan prioritas pembangunan belum ada. Hal ini dikarenakan waktu yang terbatas dalam pelaksanaan musrenbang sehingga tidak diberikan kesempatan bagi masyarakat yang hadir untuk ikut memutuskan prioritas pembangunan. Masyarakat hanya ikut menandatangani berita acara yang telah dipersiapkan.
- e) Belum adanya keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi perencanaan pembangunan terwujud menjadi program pembangunan karena masyarakat tidak tahu mengenai program/kegiatan yang diusulkan, dan mereka tidak

mengetahui jumlah anggaran yang disediakan.

Demi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan Lebong Utara maka harus dilakukan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang, di antaranya :

- a) Pegawai Kecamatan Lebong Utara mensosialisasikan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan mengusulkan anggaran untuk pengganti uang transportasi dan uang saku masyarakat yang hadir musrenbang
- b) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Lebong Utara harus dilaksanakan sesuai dengan tertib acara yang telah ada
- c) Musrenbang tingkat kecamatan sebaiknya tidak dirangkaikan dengan acara yang lain sehingga waktu masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan usulan atau tanggapan lebih banyak.

Kecamatan Lebong Utara harus melibatkan masyarakat dalam penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Dalam proses pembangunan suatu wilayah setingkat kecamatan- desa/kelurahan bahkan Kabupaten Lebong, aparat pemerintah tidak boleh mengambil keputusan tanpa melibatkan anggota masyarakat, karena kalau demikian beberapa kegiatan yang pembangunan yang ada tidak akan menyentuh masyarakat. Masyarakat pun akan acuh tak acuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

## REFERENCE

- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. (hal.5)
- Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Quantum , Jakarta. (hal.37)
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung. (hal. 15,247).
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *Manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta. (hal.26).